

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha perbankan adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam penerimaan simpanan masyarakat, bank hanya memberikan bukti tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu. Bank juga tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas kredit yang diberikan kepada debiturnya yang telah memiliki reputasi yang baik. Di samping itu, sebagai lembaga kepercayaan bank dalam operasinya lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham.

Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank harus dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga

likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat itu, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Pengelola bank dalam melaksanakan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya. Hal tersebut diperlukan karena dalam operasinya bank selain melakukan penanaman dalam aktiva produktif seperti kredit dan surat-surat berharga, juga memberikan komitmen dan jasa-jasa lain yang digolongkan sebagai *fee based operation* atau *off balanced sheet activities*. Di samping itu, pengelola bank dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dihadapkan pada berbagai kemungkinan yang harus diperhitungkan, perlu diperhitungkan pula masalah perpencaran (*spreading*) dari simpanan masyarakat, komitmen kredit yang masih berjalan serta kondisi eksternal yang mempengaruhinya.

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan persyaratan ketentuan operasional yang berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha bank. Kesemuanya itu dimaksudkan agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menunjang pemeliharaan stabilitas moneter.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991.

Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut diatas kemudian dikenal dengan metode CAMEL. Karena telah dilakukan perhitungan tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMEL selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank pada beberapa ketentuan khusus, metode tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah CAMEL Plus. Penilaian kesehatan bank meliputi 5 aspek yaitu:

- 1) *Capital*, untuk rasio kecukupan modal
- 2) *Assets*, untuk rasio kualitas aktiva
- 3) *Management*, untuk menilai kualitas manajemen
- 4) *Earning*, untuk rasio-rasio rentabilitas bank
- 5) *Liquidity*, untuk rasio-rasio likuiditas bank

Kredit macet atau NPL (*Non Performing Loan*) merupakan sesuatu yang menjadi “momok” dan harus dihindari oleh perbankan yang masuk kategori assets pada CAMEL (Rasio Kualitas Aktiva). Sebagai pencegahannya, persyaratan seorang debitur memperoleh kredit diperketat, mulai dari penjaminan, legalitas usaha, track record dan kepribadian debitur tersebut. Belajar dari pengalaman tahun 1998 dimana banyak perbankan mengalami kredit macet yang disebabkan kurangnya informasi tentang data pinjaman debitur sehingga debitur dapat

meminjam di beberapa bank dengan jaminan yang sama maka Bank Indonesia membuat sistem informasi debitur sehingga dapat termonitor rekam jejak pinjaman nasabah tersebut terhadap bank manapun berikut jaminannya.

Potensi kredit macet selain disebabkan faktor eksternal seperti kondisi krisis ekonomi juga dapat disebabkan faktor internal bank seperti lemahnya pengawasan saat persetujuan kredit. Perbankan yang agresif dalam ekspansi kredit terbuka peluang peningkatan kredit bermasalahnya. Pada sisi lain, apabila kredit tersebut lancar maka bank dapat memperoleh peningkatan pendapatan bunga atas kreditnya. Hal lain yang dapat mempengaruhi peningkatan NPL adalah apabila perusahaan tersebut meningkatkan tingkat suku bunganya. Dengan biaya suku bunga yang meningkat maka biaya modal yang dibebankan kepada debitur menjadi lebih tinggi yang berpeluang pada kesulitan untuk pengembalian hutang-hutangnya.

Perlunya pengelolaan pada rasio LDR dikarenakan apabila jumlah NPL meningkat maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan atas dana yang dihimpun dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membatasi rasio antara kredit dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Dalam menjalankan usahanya, tentu diperlukan segenap biaya atau pengorbanan sebagai kompensasi bagi keuntungan atau manfaat yang diharapkan. Pada CAMEL terdapat aspek rentabilitas yang digunakan untuk mengukur produktifitas asset, salah satunya adalah BOPO, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dimana semakin kecil BOPO maka semakin efisien biaya tersebut dalam memperoleh pendapatan. NPL (kredit macet) sebagai risiko dari

• kredit yang diberikan bank tentu butuh biaya dalam pengelolaannya agar risiko
• tersebut diminimalisir baik pada tahapan pencegahan, pemrosesan atau penyelesaian. Apabila biaya tersebut dapat dialokasikan dengan tepat sasaran diharapkan besarnya NPL akan berkurang. NIM (Net Interest Margin) yang tinggi menunjukkan besarnya tingkat keuntungan atas spread pendapatan bunga atas kredit yang diberikan terhadap beban bunga yang diberikan kepada nasabah. Salah satu cara meningkatkan NIM adalah dengan menaikkan suku bunga kredit. Namun hal ini dapat berdampak negatif pada peningkatan NPL sehingga harus diwaspadai agar NIM yang tinggi tidak berimbas pada NPL yang tinggi pula.

Bertolak dari pemikiran di atas, permasalahan kredit macet harus dihindari karena nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi bank dan ada beberapa hal yang dapat mendorongnya baik faktor internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh rasio pinjaman (LDR), rasio beban operasi (BOPO) dan rasio bunga (NIM) terhadap kredit macet yang mengambil obyek penelitian Bank DKI dengan judul *“Analisis Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR), Rasio Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) Dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Non Performance Loan Gross (NPL Gross) Pada Bank DKI Periode 2002-2011”*.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Loan To Deposit Ratio (LDR), Rasio Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) dan Nett

Interest Margin (NIM) terhadap Non Performing Loan (NPL) Gross pada Bank DKI ?

2. Variabel manakah yang paling dominan dari variabel-variabel di atas yang mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) Gross pada Bank DKI ?
3. Apakah terdapat pengaruh secara bersamaan Loan To Deposit Ratio (LDR), Rasio Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) dan Nett Interest Margin (NIM) terhadap Non Performing Loan (NPL) Gross pada Bank DKI ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing LDR, BOPO dan NIM terhadap NPL Gross pada Bank DKI.
2. Untuk mengetahui variabel manakah dari LDR, BOPO dan NIM yang paling dominan memiliki pengaruh terhadap NPL Gross pada Bank DKI.
3. Untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel LDR, BOPO dan NIM terhadap NPL Gross pada Bank DKI.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai variabel signifikan yang mempengaruhi terhadap NPL Gross perusahaan khususnya pada Bank DKI. NPL Gross sebagai faktor pengurang laba dan apabila jumlah terlalu

besar dapat menggerus modal bank. Oleh karenanya Bank Indonesia telah menetapkan bahwa besaran NPL Nett tidak boleh lebih dari 5%. Pemahaman yang detail dan mendalam mengenai NPL Gross diharapkan dapat membantu manajemen Bank DKI dalam pengawasan dan pengelolaan kreditnya terutama kredit macet. Diharapkan apabila Bank DKI dapat mengurangi atau mengeleminir jumlah NPLnya akan meningkatkan ratingnya sebagai bank sehat.



14